



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0390/Pdt.G/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan cerai talak antara;

Pemohon, umur 38 tahun (tempat / tanggal lahir, TJ. Baru, 10 Februari 1980), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. KIN, tempat tinggal di jalan Kampung Kajang, RT. 05, No. 44, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 36 tahun (tempat / tanggal lahir, Pekanbaru, 2 Maret 1982), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di jalan Kampung Kajang, RT. 05, No. 29, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 17 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 0390/Pdt.G/2018/PA.Sgta tertanggal 17 September 2018 telah mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Rumbai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 588/32/X/2002, tanggal 11 Oktober 2002 .

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di Riau selama 10 tahun kemudian pindah ke sangatta sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2(dua) orang anak bernama :
 - a. Khaerunnisa binti Heri Hendra, umur 15 tahun
 - b. Adinda Fitriani binti Heri Hendra, umur 14 tahun,keduanya dalam asuhan orang tua termohon yang di daerah Pekanbaru.
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan 2012 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Termohon digrebek warga lagi berduan di dalam kamar, sehingga "dihakimi" warga dan dibawa ke kantor polisi dan ditahan, namun laki-laki tersebut melarikan diri.
 - b. Bahwa sejak kejadian itu, pemohon membawa termohon ke Sangatta karena pemohon malu, namun sejak kejadian itu hubungan antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan tidak serumah lagi.
5. Bahwa, antara termohon dengan lelaki tersebut saat ini sudah menikah siri' dan telah memiliki anak.
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa, pemohon pernah mengajukan Cerai Talak terhadap termohon di Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor perkara 0003/Pdt.G/2015/PA. Sgta, namun berakhir gugur.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan tanggal 21 September 2018 dan 03 Oktober 2018 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah diberikan salinan surat Permohonan Pemohon, akan tetapi tidak hadir di persidangan untuk menjawab Permohonan Pemohon tersebut, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0390/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 21 September 2018 telah diberitahukan bahwa permohonan Pemohon dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 588/32/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN KUA Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Heriyanto bin Achmaroeddin, 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Jalan Senpasak RT 05 RW VI No. 37, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena mereka adalah warga saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak menjadi warga saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon bahwa pada tahun 2012 mereka bertengkar karena Termohon diketahui digerebek sedang berduaan dengan laki-laki lain di dalam kamar dan kejadian tersebut saat di Pekanbaru, karena malu lalu Pemohon membawa Termohon pindah ke Sangatta;
 - Bahwa selama tinggal di Sangatta antara Pemohon dan Termohon tetap terjadi pertengkaran;
 - Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang ini tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
2. Suriyanti Jufri binti Jufri, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kajang RT 05 Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa sejak menjadi warga saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon bahwa pada tahun 2012 mereka bertengkar karena Termohon diketahui digerebek sedang berduaan dengan laki-laki lain di dalam kamar dan kejadian tersebut saat di Pekanbaru, karena malu lalu Pemohon membawa Termohon pindah ke Sangatta;
- Bahwa selama tinggal di Sangatta antara Pemohon dan Termohon tetap terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang ini tidak pernah kumpul bersama lagi bahkan sekarang Termohon sudah meikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan perceraian diajukan di tempat kediaman Pemohon dan dalam hal ini tidak ada keberatan dari pihak Termohon, oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 maka Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (*persona standi in Judicio*) untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Pemohon (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menggunakan hak jawabnya yang bisa diasumsikan oleh Majelis Hakim bahwa Termohon telah membenarkan Permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan dengan Termohon maka untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P sebagai akta autentik setelah diperiksa memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg; Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka bukti P tersebut sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan (2) dua orang saksi di hadapan sidang dan telah menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya sesuai dengan agama yang dianutnya yang mana keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil Permohonan Pemohon, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain sesuai dengan maksud pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, setelah memperhatikan surat Permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2002;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon digerebek warga lagi berdua di dalam kamar dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri bahkan sekarang Termohon menikah dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 maka pisah rumah sejak tahun 2015 yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah merupakan



indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang mana telah berlangsung selama lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa, tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban antara keduanya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yaitu artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: *“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 H, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Adi Martha Putera, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. H. M. Riduan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Khairi Rosyadi, S.H.I.
Hakim Anggota II,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Adi MARtha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Riduan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	390.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00+

JUMLAH Rp 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)